



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMANDRA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN, KERJA SAMA, DAN ALUMNI
3. NHK : 692883

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.617.000.000

1. Tanah Seluas 1.004 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI
Rp. 220.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1077 m2/220 m2 di KAB / KOTA
KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.847.000.000
3. Tanah Seluas 50864 m2 di KAB / KOTA SIAK, HASIL SENDIRI Rp.
1.050.000.000
4. Tanah Seluas 23120 m2 di KAB / KOTA SIAK, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 92.000.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
85.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 100 D (SUPRA X) Tahun 2003, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 30.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 167.344.846

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.906.844.846

III. HUTANG

Rp. 134.005.060

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.772.839.786



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.